



KLIPING KORAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Harian Nasional : Kompas Media Indonesia
 Seputar Indonesia
 (lainnya)
 Harian Lokal : Radar Banten Kabar Banten
 Banten Raya Satelit News
 (lainnya)
 Hari/Tanggal : PASV. 16 SEPTEMBER 2015
 Halaman Koran : 8 & 7

Jelang Pemeringkatan, Badan Publik Harus Terbuka

SERANG - Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten belum lama ini melakukan *road-show* terkait keterbukaan informasi di sejumlah SKPD di lingkup Provinsi Banten maupun di Pemkab dan Pemkot se-Banten. Hasilnya, masih banyak Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu di SKPD yang tidak berfungsi. "Berdasarkan hasil *road-show* beberapa waktu lalu, masih banyak ditemukan SKPD yang sebetulnya memiliki PPID, tetapi tidak berfungsi.

Keberhasilan Banten terkait keterbukaan informasi bukan dari KI, tapi lebih besar adalah peran dari badan publiknya."

Ade Jahran
 Kadiv Sosialisasi Advokasi dan Edukasi KI Banten

si. Padahal, sudah ada SK gubernur, SK bupati, dan SK walikotanya, tetapi belum diimplementasikan," kata Ketua Divisi Sosialisasi Advokasi dan Edukasi (SAE) KI Banten Ade Jahran. Ia menatakan, belum berfungsinya PPID pembantu tersebut terlihat dari infrastruktur yang belum tersedia, seperti belum adanya meja informasi, ruang informasi, maupun personelnya. "PPID ada di SKPD, tetapi tidak ada meja informasi, ruang informasi. **Baca Jelang Hal 7**

Jelang Pemeringkatan, Badan Publik Harus Terbuka

● Sambungan dari Hal 8

masi, personelnya juga, baru ada sekretarisnya saja. Intinya, masih belum sesuai harapan sebagaimana Undang-undang KIP," kata Ade. Menurutnya, kondisi seperti ini harus menjadi perhatian pemerintah terutama pimpinan badan publik itu sendiri. Sebab, kata Dia, dalam waktu dekat ini secara nasional akan diumumkan pemeringkatan daerah terkait dengan keterbukaan informasi publik. "Oktober mendatang sudah mulai penilaian. Harapannya semua PPID pembantu berfungsi optimal, ada meja kerja, ruang kerja, dan terintegrasi an-

tara PPID pembantu dengan PPID utama. Bagaimana Banten mau mempertahankan posisi 4 besar kalau PPID tidak berfungsi sebagaimana mestinya." Dari hasil *roadshow* juga diketahui beberapa kendala PPID tak berfungsi antara lain karena PPID terkena mutasi, anggaran kurang, dan minimnya sumber daya manusia (SDM). "PPID mengeluh karena tidak diberi anggaran yang lebih. Kemudian personelnya juga kurang. Informasi dari PPID utama, banyak juga PPID pembantu yang tidak mau menyerahkan informasi, data, untuk dipasang di website," ujarnya. Menurutnya, dalam era keterbukaan informasi pu-

blik saat ini harus ada keseriusan dari badan publik dalam upaya menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia menuturkan, PPID merupakan salah satu infrastruktur Keterbukaan Informasi Publik yang menyajikan informasi publik seperti tentang keuangan, bencana, kegiatan-kegiatan dinas, yang tidak masuk kategori informasi yang dikecualikan. "Keberhasilan Banten terkait keterbukaan informasi bukan dari KI, tapi lebih besar adalah peran dari badan publiknya. Kalau tidak ada keseriusan, percuma saja. Walaupun KI sudah berupaya jor-joran, percuma saja kalau PPID-nya melempem," ujarnya. (*/*marjuki)